

## Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Laporan Keuangan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah

Anggraini Triaski Ramadhani<sup>1\*</sup>, Erna Sulistyowati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

\*Correspondent Author: <sup>1\*</sup>[anggrainitriaski4@gmail.com](mailto:anggrainitriaski4@gmail.com)

Info Artikel	Abstrak
<p>Diterima: 24 Juli 2022</p> <p>Disetujui: 03 Agustus 022</p> <p>Dipublikasikan: 07 Agustus 2022</p>	<p>Satuan kerja perangkat daerah yang berfokus pada pelayanan publik serta memiliki keleluasaan atas pola pengelolaan keuangannya disebut dengan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Sebagai satuan kerja pemerintahan daerah yang berbentuk badan layanan umum, Puskesmas X diharuskan membuat laporan keuangan atas bentuk tanggung jawab terhadap anggaran yang diterimanya sekaligus sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat. Dalam penyusunan laporan keuangannya, Puskesmas X menggunakan perangkat lunak akuntansi milik PT. Syncore Indonesia yaitu Sistem Informasi Akuntansi BLUD. Penelitian ini bertujuan ada menganalisa kesesuaian komponen laporan keuangan Puskesmas X dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Metode dekriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, data sekunder adalah data yang digunakan, serta pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Puskesmas X menggunakan SIA BLUD PT. Syncore Indonesia telah sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.</p>
<p>Keywords: Laporan Keuangan, Akuntansi Pemerintahan, Layanan Umum Daerah</p> <p>© 2022 Education and Talent Development Center of Indonesia Under the license CC-BY-SA</p> 	<p><b>Abstract</b></p> <p><i>Regional work units that focus on services are referred to and have public discretion over their financial management patterns called Regional Public Service Agency. As a regional government work unit in the form of a public service agency, Puskesmas X is required to make financial reports on the budget responsibilities it receives as a form of transparency and accountability to the community. In preparing its financial statements, Puskesmas X uses accounting software owned by PT. Syncore Indonesia, namely the BLUD Accounting Information System. This study aims to analyze the financial statements of Puskesmas X with the Statement of Government Accounting Standards (PSAP) Number 13 concerning the Preparation of Financial Reports for Public Service Agencies. Qualitative descriptive methods are used in this study, secondary data is being used, and the data collection uses observation and documentation techniques. This study shows the results that the financial statements prepared by Puskesmas X using SIA BLUD PT. Syncore Indonesia fully complied with the Statement of Government Accounting Standards (PSAP) Number 13 concerning the Preparation of Financial Statements for Public Service Agencies.</i></p>

### Pendahuluan

Menurut KKBI, pemerintahan merupakan suatu sistem yang dirancang untuk melaksanakan kekuasaan guna menata kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara dan komponen-komponennya. Sedangkan pemerintah adalah kelompok orang yang berbagi dan memikul tanggung jawab yang terbatas untuk pelaksanaan kekuasaan tersebut.

Rahman, (2021), menyebutkan bahwa ada empat fungsi utama pemerintahan yaitu fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan masyarakat, dan fungsi

pengaturan. Untuk itu, orang-orang yang menjalankan pemerintahan berhak memberika jasa serta memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta berkewajiban menciptakan administrasi pemerintahan yang baik. Demi menjadikan pemerintahan yang baik, pemerintah membutuhkan pelaporan akuntansi sebagai asas untuk menganalisis dan mengembangkan pengendalian dan pengelolaan fiskal.

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang baik. Pembentukan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) didukung oleh struktur standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang diusulkan dalam Lampiran PP 71 Tahun 2010 dengan dua belas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Namun, kedua belas PSAP tersebut belum memenuhi kebutuhan organisasi layanan publik yang menganut model Pola Pengelolaan Keuangan.

Suatu satuan kerja di wilayah pemerintah pusat/daerah yang didirikan dengan tujuan memberikan fasilitas kepada masyarakat umum dalam bentuk barang dan/atau jasa yang dipasarkan bukan untuk mencari laba serta melakukan kegiatan sesuai dengan asas efisiensi dan produktivitas disebut dengan Badan Layanan Umum (BLU). Kawenas et al., (2018) berpendapatan bahwa dalam praktiknya, Pola Pengelolaan Keuangannya BLU bersifat fleksibel, termasuk pengecualian terhadap pola pengelolaan keuangan pemerintah secara umum, seperti penerimaan yang diberikan dapat segera dipakai sebagai pengeluaran BLU tanpa perlu menunggu persetujuan dan pengesahan oleh BUN/BUD serta juga dapat melakukan pendanaan jangka pendek. BLU diberi kekuasaan agar dapat menjalankan pengelolaan penghasilan, pengendalian atas kas, pendanaan dan penetapan standar biaya pelayanan (Kawenas et al., 2018). Karena BLU merupakan satuan kerja di lingkungan pemerintahan maka BLU juga wajib untuk menyusun laporan keuangan tentang kegiatan operasionalnya. Dalam penyusunan laporan keuangan BLU, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Dijelaskan dalam peraturan ini bahwa, satuan kerja BLU diharuskan menerapkan PSAP No. 13 dalam pembuatan laporan keuangannya.

Kawenas et al., (2018), menyatakan bahwa: “BLU mempunyai posisi ganda sebagai entitas pelaporan maupun entitas akuntansi terkait pelaporan keuangannya. Pertama sebagai entitas pelaporan, BLU wajib memberikan pelaporan yang menyeluruh atas penggunaan seluruh sumber daya yang dikuasai kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pihak eksternal seperti donatur, auditor eksternal dan lembaga legislatif. Akuntansi dan laporan keuangan BLU sebagai entitas pelaporan diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia (PP 23 Tahun 2005 pasal 26 ayat 2). Kedua sebagai entitas akuntansi, BLU diwajibkan menyusun laporan keuangan yang akan dikonsolidasikan dengan entitas akuntansi yang membawahnya. Jenis laporan yang akan dikonsolidasi ini dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 23 Tahun 2005 pasal 27 ayat 7)”.

Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya, BLU harus berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual dan berbasis kas menuju akrual. Pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas diakui secara akrual dalam SAP berbasis akrual. Sedangkan, SAP berbasis kas menuju akrual mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui sebagai kas, dan aset, utang, dan ekuitas diakui dengan basis akrual dalam penerapan SAP kas menuju akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan agar dapat membantu pemerintah dan memudahkan saat menyusun laporan keuangan. Diterapkannya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dengan harapan

terdapat kesetaraan atas seluruh laporan keuangan pemerintahan, seperti laporan keuangan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan keuangan yang disusun sebagai wujud akuntabilitas BLU berdasarkan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP) Nomor 13.

Badan Layanan Umum yang berada di daerah disebut dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sama dengan BLU, BLUD juga harus menerapkan aturan yang digunakan oleh BLU. Pernyataan ini tertulis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Dengan demikian, dalam penyusunan laporan keuangannya, BLUD juga harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Kawenas et al., 2018). Pola Pengelolaan Keuangan BLUD mampu memberikan otonomi dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan Puskesmas (Dewata & Jauhari, 2021). Diharapkan melalui pelaksanaan BLUD, puskesmas mampu meningkatkan profesionalisme, menumbuhkan kewirausahaan, menerapkan prinsip keterbukaan, dan prinsip akuntabilitas dalam rangka kegiatan operasionalnya, yaitu pelayanan publik (Nadilla et al., 2016).

PT. Syncore Indonesia adalah perusahaan yang medikan layanan berbasis teknologi akuntansi dengan jasa yang ditawarkan seperti pelayanan konsultasi, sistem informasi, dan pelatihan dengan menggandeng profesional dibidangnya. Dalam unit kerjanya, PT. Syncore Indonesia memiliki program kerja bernama SYNCORE BLUD dengan tujuan untuk memajukan rumah sakit atau puskesmas yang ingin dan ataupun telah menjadi satuan kerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Melalui program ini PT. Syncore Indonesia menawarkan produk kerjanya, seperti pendampingan dan konsultasi pra/pasca BLUD, dan juga perangkat lunak untuk pengelolaan keuangan pasca BLUD.

Begitu juga dengan Puskesmas X yang merupakan klien program kerja SYNCORE BLUD PT. Syncore Indonesia yang telah menjadi unit kerja BLUD. Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat, Puskesmas X wajib untuk melakukan pelaporan keuangannya atas kegiatan operasional pendapatan dan belanjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan pelaksanaan anggaran keuangannya (Afiyah et al., 2021). Dalam penyusunan laporan keuangannya, Puskesmas X menggunakan Sistem Informasi Akuntansi BLUD milik PT. Syncore Indonesia. Dalam pengembangan SIA BLUD ini, PT. Syncore Indonesia menganut buku pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah. SIA BLUD PT. Syncore Indonesia merupakan *software* pengelolaan keuangan BLUD yang dapat menangani seluruh proses pengelolaan keuangan BLUD, mulai dari pembuatan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) hingga pelaporan akuntansi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian yaitu: (1) agar mengetahui kelengkapan komponen laporan keuangan Puskesmas X; dan (2) untuk mengetahui pos-pos laporan keuangan Puskesmas X terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

### Metode Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam metode penelitian ini. Penelitian kualitatif digunakan agar penulis dapat mengobservasi data lebih mendalam mengenai pelaporan keuangan Puskesmas X tahun 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah ada sekunder berupa laporan keuangan Puskesmas X tahun 2021, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumenter dengan membaca dan memahami dokumen-dokumen yang mendasari tentang penyajian laporan keuangan pemerintahan dan dokumen yang diperoleh yaitu laporan keuangan Puskesmas X tahun 2021. Setelah data selesai dikumpulkan, data dianalisis dengan cara: data yang berupa laporan keuangan Puskesmas X dibandingkan komponen-komponennya dengan yang disebutkan dalam PSAP No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU); data tersebut dianalisis kesuaiannya atas masing-masing komponen akun yang terdapat di laporan keuangan Puskesmas X dengan PSAP No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Setelah data selesai dianalisis, maka digunakan metode eksplanasi atau penjelasan untuk menjelaskan hasil analisis atas laporan keuangan Puskesmas X terhadap PSAP No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

### **Hasil Penelitian**

Puskesmas memegang peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya dalam subsistem upaya kesehatan (Widaningtyas, 2018). Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan fasilitas kesehatan yang dibangun dengan kegiatan operasionalnya adalah melaksanakan upaya kesehatan masyarakat di tingkat pertama dengan memprioritaskan upaya fasilitatif dan preventif agar dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang maksimal dalam wilayah kerjanya (Shofia et al., 2020). Puskesmas X yang merupakan klien program kerja SYNCORE BLUD PT. Syncore Indonesia yang statusnya telah menjadi BLUD wajib menyusun laporan keuangan berbasis akrual dengan dasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217 Tahun 2015 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Sebagai klien program kerja SYNCORE BLUD milik PT. Syncore Indonesia maka sebagai keuntungan, Puskesmas X dapat menggunakan SIA BLUD milik PT. Syncore Indonesia saat penyusunan laporan keuangannya.

Komponen laporan keuangan berdasarkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Puskesmas X, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Arus Kas;
5. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
6. Catatan Atas Laporan Keuangan

**Tabel 1.** Hasil Perbandingan Analisis Laporan Keuangan Puskesmas X dengan PSAP No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Laporan Keuangan	Menurut PSAP No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU	Penerapan di Puskesmas X	Penjelasan Hasil Analisis Perbandingan
Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran minimal memuat unsur-unsur berikut: - Pendapatan-LRA; - Belanja; - Surplus/defisit-LRA - Penerimaan pembiayaan; - Pembiayaan neto; dan - Sisa lebih kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).	Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan memuat unsur-unsur berikut: - Pendapatan-LRA; - Belanja; - Surplus/defisit-LRA - Penerimaan pembiayaan; - Pembiayaan neto; dan - Sisa lebih kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).	Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh Puskesmas X telah sesuai karena telah memuat unsur-unsur yang disebutkan.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	Laporan Perubahan SAL disajikan dengan periode perbandingan sebelumnya dan memuat unsur seperti: - Saldo anggaran lebih awal; - Penggunaan saldo anggaran lebih; - Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan - Koreksi kesalahan pembukuan; tahun sebelumnya; - Lain-lain; dan - Saldo anggaran lebih akhir	Laporan Perubahan SAL disajikan terdapat perbandingan dengan periode sebelumnya dan memuat unsur berikut: - Saldo anggaran lebih awal; - Penggunaan saldo anggaran lebih; - Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan - Koreksi kesalahan pembukuan; tahun sebelumnya; - Lain-lain; dan - Saldo anggaran lebih akhir	Laporan Perubahan SAL disajikan oleh Puskesmas X telah sesuai dengan PSAP No.13 karena dalam telah memenuhi unsur-unsur yang telah disebutkan, juga Laporan Perubahan SAL disajikan dengan perbandingan dengan periode sebelumnya.
Neraca	Neraca mencantumkan akun-akun sebagai berikut: - Kas dan setara kas; - Investasi jangka pendek; - Piutang dari kegiatan BLU; - Persediaan; - Investasi jangka panjang; - Aset tetap; - Aset lainnya; - Kewajiban jangka pendek; - Kewajiban jangka panjang; dan - Ekuitas	Neraca disajikan dengan akun-akun sebagai berikut: - Kas dan setara kas; - Investasi jangka pendek; - Piutang dari kegiatan BLU; - Persediaan; - Investasi jangka panjang; - Aset tetap; - Aset lainnya; - Kewajiban jangka pendek; - Kewajiban jangka panjang; dan - Ekuitas	Neraca yang disusun oleh Puskesmas X telah sesuai dengan masing-masing pos ada di dalam Neraca yang disajikan.
Laporan Operasional	Laporan Operasional mencakup unsur-unsur sebagai berikut: - Pendapatan-LO; - Beban; - Surplus/defiist dari kegiatan operasional; - Kegiatan nonoperasional; - Surplus/defisit sebelum	Laporan Operasional mencakup unsur-unsur sebagai berikut: - Pendapatan-LO; - Beban; - Surplus/defiist dari kegiatan operasional; - Kegiatan nonoperasional; - Surplus/defisit sebelum	Laporan Operasional Puskesmas X telah disebutkan dalam PSAP No. 13, dengan demikian penyajian Laporan Operasioal Puskesmas X telah sesuai.

Laporan Keuangan	Menurut PSAP No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU	Penerapan di Puskesmas X	Penjelasan Hasil Analisis Perbandingan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>pos luar biasa;</li> <li>- Pos luar biasa; dan</li> <li>- Surplus.defisit-LO.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pos luar biasa;</li> <li>- Pos luar biasa; dan</li> <li>- Surplus.defisit-LO.</li> </ul>	
Laporan Arus Kas	<p>Laporan Arus Kas mengajikan kas masuk dan kas keluar yang digolongkan sesuai dengan aktivitasnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitas operasi;</li> <li>- Aktivasi investasi;</li> <li>- Aktivasi pendanaan; dan</li> <li>- Aktivitas transitoris.</li> </ul>	<p>Laporan Arus Kas disajikan dalam arus kas masuk dan kas keluar yang digolongkan sesuai dengan aktivitasnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitas operasi;</li> <li>- Aktivasi investasi;</li> <li>- Aktivasi pendanaan; dan</li> <li>- Aktivitas transitoris.</li> </ul>	<p>Aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris dalam Laporan Arus Kas Puskesmas X ada dan telah sesuai dengan PSAP No. 13.</p>
Laporan Perubahan Ekuitas	<p>Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan paling kurang unsur-unsur berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekuitas awal;</li> <li>- Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;</li> <li>- Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas; dan</li> <li>- Ekuitas akhir</li> </ul>	<p>Laporan Peubahan Ekuitas menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekuitas awal;</li> <li>- Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;</li> <li>- Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas; dan</li> <li>- Ekuitas akhir</li> </ul>	<p>Unsur-unsur keuangan dalam Laporan Perubahan Ekuitas Puskesmas X telah sesuai dengan yang ada di PSAP No.13.</p>

### Pembahasan

Puskesmas X juga telah menyusun tujuh laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mana laporan keuangan ini akan dikonsolidasikan ke dinas kesehatan masing-masing wilayah. Hal ini sesuai dengan pernyataan menurut Kawenas et al., (2018) yaitu jenis laporan yang akan dikonsolidasi ini dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil dari perbandingan tersebut, menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan Puskesmas X telah sesuai dengan PSAP No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Satuan kerja BLUD diharuskan untuk menyampaikan laporan keuangannya minimal sekali setiap tahun anggaran sebagai rangka untuk mewujudkan tujuan BLUD (Firmanto et al., n.d.). Pernyataan tersebut selaras dengan Puskesmas X yang merupakan satuan kerja BLUD, dengan menggunakan SIA milik PT. Syncore Indonesia, Puskesmas X dapat membuat laporan keuangan dengan periode yang berbeda yaitu bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Namun, untuk dikonsolidasikan ke dinas kesehatan wilayahnya hanya dilakukan sekali setiap tahun. Adapun penjelasan mengenai perbandingan laporan keuangan puskesmas X adalah sebagai berikut:

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan mengenai realisasi pendapatan-LRA dengan belanjanya, juga surplus/defisit-LRA, serta pembiayaan, yang akan menghasilkan sisa lebih/kurang atas realisasi anggaran yang kemudian dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode dengan metode yang sama. Dalam penyajian LRA ini, Puskesmas X mendapatkan Surplus atas selisih realisasi Pendapatan-LRAnya dikurangi dengan belanjanya, juga SiLPA atas selisih lebih antara pendapatan-LRA dikurangi dengan belanja dikarenakan Puskesmas X tidak memiliki transaksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Puskesmas X menyajikan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) yang berisikan kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 2021 yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020. Laporan Perubahan SAL milik Puskesmas X memiliki nominal dalam Saldo Anggaran Lebih Awal dikarenakan Puskesmas X tidak menyetorkan sisa kas dan setara kas pada periode sebelumnya. Sehingga kas dan setara kas ini akan diakumulasi menjadi SAL akhir pada laporan ini. Neraca, merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan Puskesmas X mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tahun pelaporan 2021 mengalami kenaikan pada nilai aset, baik aset lancar maupun aset tetapnya, kewajiban lancarnya dan juga nilai ekuitas yang mengalami kenaikan dari pada periode pelaporan tahun sebelumnya. Puskesmas X dalam pelaporan neracanya tidak memiliki transaksi kewajiban jangka panjang tetapi terdapat pos kewajiban jangka panjang yang tertera dalam laporan ini.

Laporan Operasional (LO) memperlihatkan laporan mengenai pendapatan-LO, beban, surplus/defisit atas aktivitas operasional dan kegiatan non operasional yang dilakukan Puskesmas X. Laporan Operasional Puskesmas X menyajikan pendapatan dari kegiatan operasional yang diringkaskan menjadi pendapatan jasa layanan, pendapatan hibah, pendapatan hasil kerja sama, pendapatan APBD, dan pendapatan lain-lain BLUD yang sah. Belanja disajikan dengan masing-masing jenis belanjanya, seperti belanja pegawai, persediaan, jasa, dll. Sedangkan untuk kegiatan operasional disajikan dengan; surplus/defisit atas penjualan aset non lancar; penurunan nilai aset surplus/defisit dari kegiatan non operasional; dan lainnya. Disajikan juga atas unsur pendapatan dan beban luar biasa. Komponen-komponen Laporan Operasional ini akan membentuk Surplus/Defisit-LO. Puskesmas X mengalami surplus atas laporan operasionalnya. Dalam pelaporan ini juga dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya untuk mencari nilai persentase kenaikan dan penurunan.

Laporan Arus Kas Puskesmas X yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan Puskesmas X telah sesuai dengan laporan Arus Kas yang disusun oleh Puskesmas X, dibagian kegiatan operasinya telah mencakup arus kas masuk seperti; pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat seperti pendapatan atas jasa layanan puskesmas yang diberikan; pendapatan hasil kerja sama seperti pendapatan atas kerja sama sewa kantin dan parkir; dan pendapatan BLU lainnya seperti pendapatan atas jasa giro. Sedangkan pada kas keluar, mencakup: pembayaran pegawai yang ditunjukkan dengan pembayaran gaji honorer; pembayaran barang seperti biaya pengadaan bahan, dll.

Kegiatan investasi yang dilaporkan dalam Laporan Arus Kas yang disusun oleh Puskesmas X baik dalam arus kas masuk maupun arus kas keluarnya, tidak terdapat transaksi karena memang Puskesmas X tidak melakukan penerimaan dan pengeluaran atas investasi apapun pada tahun berjalan. Sama halnya dengan aktivitas pendanaan yang dilaporkan, Puskesmas X juga tidak memiliki transaksi pendanaan dalam laporan arus kasnya. Sedangkan dalam Laporan Arus Kas pada kegiatan transitoris yang lebih jelasnya adalah kegiatan masuk dan keluarnya kas selain aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan terdapat pajak atas penghasilan, yaitu akun: Utang PPH 21, Utang PPh 22, Utang PPh 23, dan Utang PPN atas transaksi belanja atau pembayaran yang jumlahnya sama atas pajak yang dipungut dan disetorkan.

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan pengetahuan mengenai naik atau turunnya ekuitas selama tahun pelaporan yang dibandingkan dengan pelaporan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas yang disajikan oleh Puskesmas X memuat laporan pada tahun 2020 dan 2021 dan terdapat unsur ekuitas awal, surplus/defisit-LO yang

jumlahnya sama dengan surplus.defisit di laporan operasional, dan untuk pengurang atas ekuitas awal disajikan: unsur koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, dan lain-lain sehingga dapat diketahui nilai ekuitas akhir.

### Kesimpulan

Sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum Daerah, Puskesmas X telah menyusun laporan keuangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga komponen-komponen laporan keuangan tahun 2021 yang disusun oleh Puskesmas X dengan menggunakan Sistem Informasi Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik PT. Syncore Indonesia telah sepenuhnya sesuai dan Puskesmas X telah mengimplementasikan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) pada penyusunan laporan keuangannya. Dengan hal ini penulis menyarankan agar Puskesmas X dapat mempertahankan proses pengerjaan penyusunan laporan keuangannya agar dapat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terutama pada penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

### Daftar Pustaka

- Afiyah, S., Arsy, A. A., & Engkus. (2021). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) pada Pusat Kesehatan Masyarakat Cibugel Kabupaten Sumedang. *Jurnal Inovasi Penelitian (JIP)*, 2(4), 1113–1120.
- Dewata, E., & Jauhari, H. (2021). The Readiness for Implementation of Financial Management Patterns of Regional Public Services Agency at Public Health Center. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 4(2), 191–206. <https://doi.org/10.33005/jasf.v4i2.221>
- Firmanto, Y., Trisnawati, N., Rokhman, M. T. N., Rahayu, Y. N., Akuntansi, P. S., Brawijaya, U., Akuntansi, P. S., Wisnuwardhana, U., Manajemen, M., Universitas, P., Malang, W., & Keuangan, L. (n.d.). *Pendampingan Konsultansi Manajemen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dalam Rangka Penyusunan Laporan*.
- Kawenas, R. I., Kalangi, L., & Lambey, L. (2018). Analisis Penerapan PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.35800/jjs.v9i1.18685>
- Nadilla, T., Basri, H., & Fahlevi, H. (2016). Identifikasi Permasalahan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD)-Studi Kasus pada Rumah Sakit Permata dan Rumah Sakit Berlian. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(2), 89–99. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4513>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. (2018). In *Jakarta* (p. 53).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217 Tahun 2015 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. (2009).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). (2010). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Rahman, F. (2021). Keberhasilan Pemerintahan Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Semarang. *Qistie*, 14(1), 41–63.
- Shofia, T. R., Mutmainah, S., & ... (2020). Analisis Penerapan Psap No. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Uptd Puskesmas Gunung Pati Semarang. ... *Akuntansi Keuangan* ..., 3(1), 89–101.  
<https://jurnal.polines.ac.id/index.php/akunbisnis/article/view/2143>
- Widaningtyas, E. (2018). Kesiapan Tata Kelola Puskesmas Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (Blud). *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 6(1), 20.  
<https://doi.org/10.33560/.v6i1.180>